



# JEP

# JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN

ISSN : 2302 – 9595  
Volume 7 No 2 Juli 2018

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Tenaga Kerja Terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Pulau Sumatera  
**Taufiqur Rahman , I Wayan Suparta , Arivina Ratih Taher**

Pengaruh Belanja Pegawai, *Mandatory Spending*, Dan  
Pertumbuhan Ekonomi Terhadap *Fiscal Space* Seluruh Provinsi  
Di Sumatera  
**Aditia Rinaldi , Marselina, I Wayan Suparta**

Dampak Ekspor Dan Populasi Terhadap Produk Domestik Bruto  
(PDB) Di Indonesia Periode 1980 Hingga 2015  
**Ferri Kuswantoro**

The Effect Of Government Governance And *Tax Ratio* To  
Economic Growth (Case Study In Asean Countries)  
**Finidya Demarani**

Nilai Tambah Pada Industri Ikan Kering Tipis Di Juata Laut  
**Sulistya Rini Pratiwi, Meylin Rahmawati**

Model Data Panel Penawaran Pembiayaan Bank Umum Syariah  
**Irma Febriana MK**

## FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNILA

## **Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Pulau Sumatera**

Taufiqur Rahman <sup>1</sup>, I Wayan Suparta <sup>2</sup>, Arivina Ratih Taher <sup>3</sup>  
Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung  
[Experiac25791@gmail.com](mailto:Experiac25791@gmail.com), [Wayansuparta61@gmail.com](mailto:Wayansuparta61@gmail.com),  
[arivinaratih@gmail.com](mailto:arivinaratih@gmail.com)

### *Abstract*

*Fiscal decentralization and economic growth are the two main issues that continue to be discussed. Both of these topics are not resolved in view of the important relationship between the two. The relationship is more specifically examined in the economic sphere of whether fiscal decentralization has a positive or negative effect on economic growth. Indeed, from various studies on fiscal decentralization and economic growth that have been done before there are different results. This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization and labor on the economic growth of the province on the island of Sumatra partially and wholly.*

*The data used in the study is secondary data for the period 2011-2015. Hypothesis testing is done by Data Panel Regression Analysis method by using Eviews 9.0 program to analyze the influence of Fiscal Decentralization and Labor on Economic Growth Province in Sumatera Island. The test used is chow test, hausman test, t test and F test.*

*The result of data analysis shows that Fiscal Decentralization of Expenditure side, Fiscal Decentralization of Revenue and Labor side have positive and significant influence to Economic Growth Province in Sumatera Island. Partially, Fiscal Decentralization of Expenditure and Labor Affects Positive and Significant Effect on Economic Growth of Province in Sumatera Island. While Decentralization of Revenue side have positive but not significant influence to Economic Growth Province in Sumatera Island.*

**Keywords:** *Fiscal Decentralization, Labor, Economic Growth, and Panel Data.*

### **Pendahuluan**

Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua bahasan utama yang terus menjadi pembahasan. Kedua topik ini seperti tidak habis diteliti mengingat hubungan penting antara keduanya. Hubungan tersebut lebih spesifik diteliti dalam ranah ekonomi yaitu apakah desentralisasi fiskal

berpengaruh positif ataukah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Awal permulaan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, kemudian Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Timur. Namun ketiga undang-undang ini hanyalah konsep saja tanpa adanya implementasi pelaksanaan dari otonomi daerah (Saragih, 2003).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah sepenuhnya dilaksanakan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Memang dari berbagai penelitian mengenai desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang telah dilakukan sebelumnya terdapat hasil yang berbeda.

Beberapa penelitian mengenai desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang telah dilakukan guna mendapatkan hasil dari pengaruh desentralisasi fiskal, khususnya dengan menggunakan model ekonometrika ternyata menghasilkan simpulan yang

berbeda. Disatu pihak desentralisasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi ((Davodi dan Zou,1998) dan (Zhang dan Zou, 1998)). Sementara dilain pihak terdapat penelitian yang menunjukkan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebagaimana hasil dari penelitian Lin dan Liu (2000), Akai dan Sakata (2002), Faridi (2011) serta Patonov (2013).

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini akan mengkaji pengaruh desentralisasi fiskal dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi untuk wilayah Provinsi di Pulau Sumatera. Meskipun pada penelitian sebelumnya terdapat perbedaan mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan membawa sejumlah pertanyaan apakah desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang positif? Ataukah memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **Kajian Pustaka**

Hasil studi terdahulu yang dilakukan oleh Davodi dan Zou (1998) dan Zhang dan Zou (1998) menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Davodi dan

Zou (1998) dalam penelitiannya atas 46 negara maju dan negara berkembang dengan menggunakan analisis data panel dari tahun 1970 sampai 1989 menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju, dan memiliki pengaruh yang negatif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang.

Simpulan yang sama juga diperoleh dari penelitian Zhang dan Zou (1998) dalam penelitiannya di China dengan menggunakan analisis regresi data panel dalam kurun waktu 1978 sampai 1992. Hasil penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil negatif ini dikarenakan tahap perkembangan ekonomi di Cina yang dimana pemerintah pusat terus dibatasi oleh sumber daya untuk investasi publik dalam prioritas nasional.

Hasil penelitian yang berbeda diperoleh dari penelitian Lin dan Liu (2000), Akai dan Sakata (2002), Faridi (2011), serta Patonov (2013). Lin dan Liu (2000) meneliti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap

pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi China periode 1970 sampai 1993. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel, dan temuan yang dihasilkan menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasilnya juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara signifikan dipengaruhi oleh reformasi pedesaan, akumulasi modal dan pengembangan sektor non negara. Pengaruh positif ini disebabkan oleh meningkatnya efisiensi dalam alokasi sumber daya.

Akai dan Sakata (2002) dalam penelitiannya di 50 negara bagian Amerika pada tahun 1992 sampai 1997 dengan menggunakan analisis data panel juga menemukan pengaruh positif dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Pengaruh positif ini disebabkan oleh tidak adanya distorsi pada data yang digunakan dalam permodelan regresi.

Faridi (2011) dalam penelitiannya di Pakistan dengan menggunakan analisis model autoregressive dari tahun 1972 sampai dengan tahun 2009 menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh positif dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya desentralisasi fiskal dapat menciptakan suatu kondisi dimana akan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas dan pelayanan publik karena mekanisme pembangunan telah diserahkan kepada pemerintah provinsi oleh pemerintah pusat.

Patonov (2013) dalam penelitiannya atas 27 negara Uni Eropa dengan menggunakan analisis data panel dari tahun 2000 sampai 2010 menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 27 negara Uni Eropa. pengaruh positif tersebut terwujud karena terjadinya peningkatan efisiensi pengeluaran, peningkatan efisiensi disektor publik dan pengalihan kekuasaan belanja dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat mengkatalisasi pertumbuhan PDB tahunan.

### **Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pandangan *Pro-decentralization* didasarkan pada keterbatasan pemerintah pusat dalam menjangkau tiap-tiap daerah

sehingga menciptakan ketidakefisienan dalam pelayanan Kraybill dalam Yamoah (2007). Desentralisasi fiskal akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi dalam alokasi sumber daya publik. Menurut Oates (1993) desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi yaitu pemerintah lokal mempunyai posisi yang lebih baik daripada pemerintah pusat untuk menyalurkan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, yang selanjutnya efisiensi akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi ditingkat nasional.

Pendapat lain yang mendukung desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yakni Tiebout (1956), Oates (1972), Tresch (1981, Weingast (1995) ), Breton (1996) dalam Litvack et al. (1998) dalam Sidik (2002) yang menyatakan bahwa pelayanan publik yang lebih efisien seyogyanya harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memiliki kontrol yang lebih dekat karena:

- a. Pemerintah daerah lebih mampu mengetahui kebutuhan masyarakatnya.
- b. Keputusan pemerintah daerah akan lebih cepat dilakukan tanpa menunggu keputusan pemerintah pusat dalam menyediakan layanan publik terhadap masyarakat sehingga akan mendorong pemerintah daerah melakukan efisiensi dalam penggunaan dana dari masyarakat.
- c. Kompetisi antar pemerintah daerah akan menciptakan inovasi dan kreatifitas dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat.

Thiessen (2003) mengidentifikasi mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- a. Penyediaan barang dan jasa publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada setiap daerah secara seragam maka akan menimbulkan inefisiensi karena terdapat perbedaan kebutuhan setiap daerah. Dengan desentralisasi fiskal, maka setiap sumber daya yang dimiliki harus dialokasikan secara tepat sesuai

kebutuhan masing-masing daerah sehingga akan memicu efisiensi dan meningkatkan *output* perekonomian sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian dari sisi kebijakan pengeluaran, pemerintah daerah yang merespon perbedaan-perbedaan kebutuhan masyarakatnya akan cenderung lebih efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ketimbang pemerintah pusat yang tidak merespon cepat perbedaan-perbedaan kebutuhan setiap daerah tersebut.

- b. Desentralisasi fiskal akan menciptakan kompetisi vertikal dan horizontal diantara tingkat pemerintahan yang berbeda. Dimana dalam hal ini pemerintah daerah akan lebih fokus pada persaingan dalam memberikan bermacam-macam fasilitas atau kemudahan bagi kegiatan bisnis, serta melakukan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik, namun tetap mempertahankan tingkat pendapatan tertentu. Hal ini akan menciptakan situasi dimana setiap pemerintah daerah akan menggunakan anggaran secara efisien untuk membiayai

pengeluaran sektor publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mencegah terjadinya *over supply* barang dan jasa publik serta inefisiensi pelayanan sektor publik. Kemudian berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

- c. Desentralisasi fiskal secara eksplisit menunjukkan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada pemerintah daerah untuk secara aktif mencari inovasi dalam penyediaan barang dan jasa publik. Kompetisi antar pemerintah daerah akan memacu pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik dengan biaya yang minimum namun dengan kualitas yang baik, dan mendorong efisiensi produksi sehingga akan mendorong peningkatan perekonomian.
- d. Adanya argumen politik bahwa desentralisasi fiskal akan mengurangi konsentrasi kekuatan politik, melemahkan pengaruh

pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kebijakan publik dan mendorong demokrasi daerah. Sedangkan Pandangan *anti-decentralization* didasarkan pada keterbatasan pemerintah daerah dalam menempatkan dan mengimplementasikan tanggung jawab utama pemerintah daerah. Dalam hal ini yang terjadi adalah desentralisasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oates (1972) dalam Yamoah (2007) berpendapat bahwa desentralisasi fiskal adalah kerugian dalam skala ekonomi, yang dimana dengan sistem desentralisasi, setiap pemerintah daerah harus mengimplementasikan agenda pertumbuhan ekonomi yang independen dari pemerintah daerah lainnya sehingga mungkin akan meningkatkan biaya per unit output layanan karena mereka akan beroperasi pada skala yang lebih kecil.

Prud'homme (1995) berpendapat bahwa desentralisasi akan membuat kebijakan redistribusi akan menjadi lebih sulit, karena kebijakan pemerintah daerah dapat bertentangan dengan kebijakan nasional.

### **Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

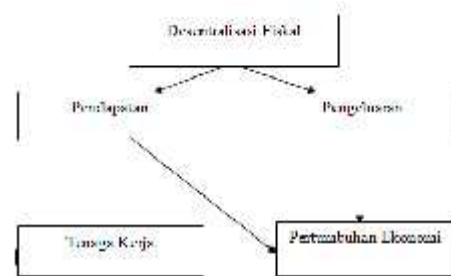
Lewis dalam Mulyadi (2003) mengemukakan teorinya mengenai ketenagakerjaan, yaitu; kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja disektor lain.

Disisi lain, tenaga kerja dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi.

Sedangkan dari sisi kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti dalam penelitian Lim (1996) menyimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara Jepang dan Korea Selatan dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang berkualitas yang tercermin dalam tingkat melek huruf (*literacy rate*) yang tinggi sehingga tenaga kerja mudah menyerap ilmu dan mampu beradaptasi dengan

perubahan teknologi dan ekonomi yang terjadi.

Kemudian Akai dan Sakata (2002) yang dimana hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kuantitas dan kualitas dari sumber daya manusia regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika. Sehingga tenaga kerja yang berkualitas akan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### **Metode Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera. Daerah Provinsi tersebut meliputi 10 Provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Daerah Provinsi yang akan diteliti yakni, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi



Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam penelitian ini, akan mengkaji mengenai desentralisasi fiskal, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

#### **Jenis Dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua selama kurun waktu tahun 2011 hingga 2015. Data yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu data mengenai desentralisasi fiskal, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2011 sampai tahun 2015.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yakni Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi 2011-2014, Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi 2013-2016, Aceh Dalam Angka Tahun 2011-2016, Sumatera Utara dalam Angka 2011-2016, Riau Dalam Angka 2011-2016, Sumatera Barat Dalam Angka 2011-2016, Jambi Dalam Angka 2011-2016, Sumatera Selatan Dalam Angka 2011-2016, Bengkulu Dalam Angka 2011-2016, Lampung Dalam Angka 2011-2016, Kepulauan Bangka

Belitung Dalam Angka 2011-2016, dan Kepulauan Riau Dalam Angka 2011-2016. Metode pengumpulan data dengan menggunakan, metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data Pendapatan Asli Daerah, Total Pendapatan Daerah, Pengeluaran Daerah, Pengeluaran Pemerintah Pusat, dan Tenaga Kerja yang dilakukan dengan mengambil data dari berbagai dokumentasi atau publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

#### **Variabel Operasional Dan Pengukurannya**

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 2010 dan dinyatakan dalam bentuk satuan persen (%) yang kemudian disebut PE.

Desentralisasi Fiskal Pengeluaran

Variabel desentralisasi fiskal yang digunakan dalam penelitian ini merupakan indikator desentralisasi fiskal yang digunakan oleh Zang dan Zou (1998). Variabel indikator pengeluaran dalam penelitian ini dinotasikan menjadi RPN. RPN merupakan rasio pengeluaran pemerintahan Provinsi terhadap total

pengeluaran pemerintah pusat dalam bentuk persentase (%).

#### Desentralisasi Fiskal Pendapatan

Variabel desentralisasi fiskal yang digunakan dalam penelitian ini merupakan indikator desentralisasi fiskal yang juga digunakan oleh Akai dan Sakata (2002) yakni kemandirian fiskal yang diukur dengan Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Variabel kemandirian fiskal dalam penelitian ini dinotasikan menjadi RK yang diukur dalam bentuk persentase (%).

#### Tenaga Kerja

Variabel tenaga kerja yang digunakan dalam penelitian ini merupakan rasio tenaga kerja yang juga digunakan oleh Akai dan Sakata (2002) yakni rasio lulusan SMA/Sederajat terhadap penduduk usia kerja. Tenaga kerja yang memiliki ijazah SMA/Sederajat menunjukkan tingkat kualitas sumber daya manusia yang lebih baik karena lebih cepat dalam proses penyerapan teknologi, sehingga akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Variabel tenaga kerja dalam penelitian ini dinotasikan menjadi RTK yang diukur dalam bentuk persentase (%).

#### Teknik Analisis

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan model data panel untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Model persamaannya adalah sebagai berikut:

$$PE_{it} = \alpha_i + \beta_1 RPN_{it} + \beta_2 RK_{it} + \beta_3 RTK_{it} + \mu_{it}$$

Keterangan:

PE : Pertumbuhan Ekonomi (%)

RPN : Rasio Pengeluaran (%)

RK : Rasio Kemandirian (%)

RTK : Rasio Tenaga Kerja (%)

$\alpha_i$  : Intersep

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_4$  : Koefisien Regresi variabel bebas

$\mu_{it}$  : Komponen error di waktu t untuk unit cross-section

i : 1,2,...,10 (data cross-section Provinsi di Sumatera)

t : 1,2,...,5 (data time series, tahun 2011-2015)

Dalam penelitian ini menggunakan panel seimbang (*balanced panel*) karena periode *time series* selama lima tahun dengan data *cross-section* sebanyak sepuluh daerah.

Dalam analisis model data panel terdapat tiga metode pendekatan yang terdiri dari *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* (Ekananda, 2016). Kemudian untuk memilih metode terbaik dengan menggunakan uji chow dan uji hausman. Sedangkan untuk

menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan uji signifikansi parsial dua arah dan uji signifikansi keseluruhan.

### Hasil Dan Pembahasan

Uji Chow, Uji Hausman  
Uji Chow

Tabel 1. Hasil Uji Chow

| Effects Test                     | Statistic | d.f.   | Prob.    |
|----------------------------------|-----------|--------|----------|
| Redundant Fixed Effects Tests    |           |        |          |
| Pool: POOL01                     |           |        |          |
| Test cross-section fixed effects |           |        |          |
| Cross-section F                  | 7.956093  | (9,37) | 0.0000   |
| Cross-section Chi-square         | 53.83990  | 1      | 9 0.0000 |

Sumber: Eviews 9.0

Tabel 1. menjelaskan dari hasil estimasi regresi data panel yang telah dilakukan uji chow yakni uji untuk menentukan metode manakah yang lebih baik antara *common effect* dan *fixed effect*. Dari Tabel menunjukkan nilai dari Chi-square adalah sebesar 53.839901 lebih besar dari nilai Chi tabel sebesar 7.956093 dengan nilai p-value sebesar 0,0000 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 5% (0,05).

Berdasarkan hasil uji chow ini maka dapat disimpulkan bahwa metode *fixed effect* adalah metode yang lebih baik digunakan daripada metode *common effect* dalam penelitian ini.

Uji Hausman

Tabel 2 Hasil Uji Hausman

| Test Summary                             | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob.    |
|--|-------------------|--------------|----------|
| Correlated Random Effects - Hausman Test |                   |              |          |
| Pool: POOL01                             |                   |              |          |
| Test cross-section random effects        |                   |              |          |
| Cross-section random                     | 39.60527          | 3            | 3 0.0000 |

Sumber: Eviews 9.0

Tabel 2. menunjukkan hasil dari uji Hausman dalam menentukan metode manakah yang lebih baik digunakan antara metode *fixed effect* dan metode *random effect*. Dari Tabel menunjukkan bahwa nilai dari Chi-Square hitung adalah sebesar 39.605273. Sedangkan Chi tabel dengan degree of freedom sebesar 3 memiliki nilai sebesar 7,81. Maka dari itu Chi-Square lebih kecil dari nilai Chi tabel serta p-value sebesar 0,0000 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 5% (0,05) atau signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa metode *fixed effect* lebih baik digunakan daripada metode *random effect* dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Parsial, Uji Signifikansi Keseluruhan  
Tabel 3. Hasil Uji t Rasio Pengeluaran, Rasio Kemandirian, Rasio Tenaga Kerja

| riabel | Koefisien | t-statistik | t-tabel | Kesimpulan |
|--------|-----------|-------------|---------|------------|
| RPN    | 1,919,436 | 3,650,699   | 2,021   | Tolak Ho   |
| RK     | 0,019499  | 0,650359    | 2,021   | Terima Ho  |
| RTK    | 0,242475  | 3,224,505   | 2,021   | Tolak Ho   |

Sumber: *Eviews 9.0, data diolah*

Berdasarkan Tabel 3. dapat dilihat bahwa t-hitung sebesar 3.650699 lebih besar daripada t-tabel sebesar 2,021. Maka menolak Ho dan menerima Ha, yang berarti bahwa variabel Rasio Pengeluaran (RPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera.

Berdasarkan Tabel 3. dapat dilihat bahwa t-hitung sebesar 0,650359 lebih kecil daripada t-tabel sebesar 2,021. Maka menerima Ho dan menolak Ha, yang berarti bahwa variabel Rasio Kemandirian (RK) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera.

Berdasarkan Tabel 3. dapat dilihat bahwa t-hitung sebesar 3,224505 lebih besar daripada t-tabel sebesar 2,021. Maka menolak Ho dan menerima Ha, yang berarti bahwa variabel Rasio Tenaga Kerja berdasar Ijazah SMA/Sederajat (RTK) berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera.

Uji F digunakan untuk pengujian pengaruh variabel-variabel bebas secara keseluruhan, yaitu untuk menguji pengaruh Rasio Pengeluaran (RPN), Rasio Kemandirian (RK), dan Rasio Tenaga Kerja berdasar Ijazah SMA/Sederajat (RTK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) Provinsi di

dasar Pulau Sumatera.

Berhasil estimasi, diperoleh nilai F-hitung sebesar 14,63463 sedangkan nilai F-tabel pada tingkat kepercayaan 5% sebesar 2,81 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian, F-hitung lebih besar daripada F-tabel, berarti variabel Rasio Pengeluaran (RPN), Rasio Kemandirian (RK), dan Rasio Tenaga Kerja berdasar Ijazah SMA/Sederajat (RTK) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) Provinsi di Pulau Sumatera.

Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Sisi Pengeluaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil regresi, koefisien regresi untuk variabel Rasio Pengeluaran (RPN)

menunjukkan tanda positif, yakni sebesar 19,19436. Hal ini berarti bahwa dengan kenaikan Rasio Pengeluaran sebesar 1 persen, maka akan berakibat pada kenaikan Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebesar 19,19436 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akai dan Sakata (2002) yang dimana indikator pengeluaran berpengaruh positif dan signifikan.

Pada Tabel 4. menjelaskan mengenai perkembangan belanja daerah Provinsi di Pulau Sumatera. Seluruh Provinsi di Pulau Sumatera mengalami peningkatan dalam nilai belanja daerah, meskipun pada tahun 2015 terdapat dua Provinsi yang nilai belanja daerahnya mengalami penurunan. Kondisi menjelaskan bahwa peningkatan belanja daerah pada pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera. Hal tersebut dapat dipahami, karena

secara implisit peningkatan jumlah belanja pemerintah daerah Provinsi mencerminkan peningkatan investasi publik di masyarakat.

Lebih lanjut, dengan desain desentralisasi fiskal di Indonesia saat ini yang menitikberatkan pada sisi pengeluaran, maka esensi dari pelimpahan wewenang dalam mengurus keuangan daerahnya masing-masing adalah diskresi (kebebasan) untuk membelanjakan dana yang telah dianggarkan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah. Hal ini senada dengan pernyataan Wagner dalam Mangkoesobroto (1998) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Peacock dan Wiseman dalam Mangkoesobroto (1998) berpendapat bahwa pengeluaran dari waktu ke waktu semakin meningkat karena semakin bertambahnya kegiatan pemerintah yang memerlukan pembiayaan.

Tabel 4. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015 (Miliar Rupiah)

*Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Pulau Sumatera*

| Provinsi         | Tahun   |          |          |          |          |
|------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
|                  | 2011    | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     |
| Aceh             | 8917,05 | 10688,98 | 12640,52 | 13005,64 | 12611,11 |
| Sumatera Utara   | 6263,36 | 7922,7   | 7412,09  | 7823,45  | 8495,65  |
| Sumatera Barat   | 2636,38 | 3283,83  | 3424,59  | 3876,11  | 4326,35  |
| Riau             | 6861,96 | 8753,99  | 8972,95  | 9583,49  | 10892,85 |
| Jambi            | 2972,06 | 3487,09  | 3757,07  | 3879,15  | 3604,24  |
| Sumatera Selatan | 4954,29 | 5791,05  | 5989,47  | 6247,54  | 6874,39  |
| Bengkulu         | 1686,66 | 1859,86  | 1937,72  | 2196,41  | 2436,2   |
| Lampung          | 2889,17 | 3901,69  | 3925,66  | 4567,67  | 4898,78  |
| Kep.Babel        | 1563,92 | 1627,06  | 1814,13  | 1921,56  | 2212,65  |
| Kep.Riau         | 2651,88 | 2964,14  | 3458,01  | 3657,715 | 2649,77  |

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Tahun 2011-2015 (data diolah)

**Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Sisi Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil regresi, koefisien regresi untuk variabel Rasio Kemandirian (RK) menunjukkan tanda negatif, yakni sebesar 0,019499. Hal ini berarti bahwa dengan kenaikan Rasio Kemandirian (RK) sebesar 1 persen, maka akan berakibat pada peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebesar 0,019499 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akai dan Sakata (2002) yang dimana indikator otonomi/kemandirian berpengaruh positif namun tidak signifikan.

Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007).

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), Halim (2007).

Tabel 5. Rasio Kemandirian Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015 (%)

| Provinsi         | Tahun |       |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
| Aceh             | 10,55 | 9,82  | 12,42 | 14,92 | 16,98 |
| Sumatera Utara   | 72,17 | 56,26 | 55,30 | 56,83 | 57,59 |
| Sumatera Barat   | 55,39 | 41,93 | 43,40 | 47,56 | 46,31 |
| Riau             | 40,62 | 37,81 | 38,97 | 39,90 | 50,31 |
| Jambi            | 47,35 | 37,51 | 36,86 | 40,48 | 39,66 |
| Sumatera Selatan | 46,65 | 38,32 | 36,97 | 38,60 | 42,31 |
| Bengkulu         | 37,78 | 30,96 | 30,96 | 33,84 | 32,16 |
| Lampung          | 55,21 | 45,10 | 45,39 | 50,25 | 46,94 |
| Kep.Babel        | 38,48 | 31,65 | 32,42 | 32,74 | 30,30 |
| Kep.Riau         | 33,08 | 29,23 | 31,93 | 36,66 | 40,27 |
| Rata-rata        | 43,73 | 35,86 | 36,46 | 39,18 | 40,28 |

Sumber: Statistik Keuangan Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015 (data diolah)

Tabel 5. Menunjukkan rasio kemandirian tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Sumatera Utara yang dimana secara konsisten menjadi yang tertinggi selama kurun waktu 2011-2015 dengan nilai kemandirian mencapai 55,30%-72,17%. Sedangkan rasio kemandirian terendah adalah Provinsi Aceh dengan nilai rasio kemandirian sebesar 9,82%-16,98% selama kurun waktu 2011-2015. Sedangkan nilai rasio kemandirian secara rata-rata dari kesepuluh Provinsi di Pulau Sumatera berkisar antara 35,86%-43,73%.

Pencapaian kemandirian daerah yang mampu melampaui 50% sebagaimana diterangkan dalam Tabel 5 yang terjadi di empat

pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera boleh jadi merupakan refleksi dari tingginya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sehingga dengan pencapaian ini, maka keempat daerah Provinsi di Pulau Sumatera tersebut yakni, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Lampung memiliki sumber dana yang besar yang bisa digunakan sebagai belanja prioritas seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan publik dan barang publik yang bisa menggerakkan perekonomian guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Namun di lain pihak, terdapat enam Provinsi yang kemandirian daerahnya belum mampu mencapai 50% yakni Provinsi Aceh, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki sumber dana yang besar dari daerahnya sendiri yang bisa digunakan sebagai belanja prioritas seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan publik, dan barang publik yang dapat menggerakkan perekonomian.

Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil regresi, koefisien regresi untuk variabel Rasio Tenaga Kerja berdasar Ijazah SMA/Sederajat (RTK) menunjukkan tanda positif, yakni sebesar 0,242475. Hal ini berarti bahwa dengan kenaikan Rasio Tenaga Kerja berdasar Ijazah SMA/Sederajat (RTK) sebesar 1 persen, maka akan berakibat pada kenaikan Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebesar 0,242475 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil ini sejalan dengan Akai dan Sakata (2002) yang dimana variabel tenaga kerja yang diproyeksikan dengan rasio lulusan SMA terhadap tenaga kerja usia 18 tahun - 24 tahun berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Tabel 6. Jumlah Tenaga Kerja Berijazah SMA/Sederajat Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015 (Jiwa)

| Provinsi         | Tahun   |         |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                  | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |
| Aceh             | 1142726 | 1157369 | 1191114 | 1224599 | 1281510 |
| Sumatera Utara   | 3414544 | 3573017 | 3766898 | 3818408 | 4042331 |
| Sumatera Barat   | 1176629 | 1196040 | 1201051 | 1259581 | 1376963 |
| Riau             | 1891216 | 1974535 | 2000421 | 2007739 | 2104971 |
| Jambi            | 724544  | 774199  | 798527  | 829230  | 803147  |
| Sumatera Selatan | 1770832 | 1794446 | 1847501 | 1706415 | 1838836 |
| Bengkulu         | 439440  | 458815  | 465077  | 490261  | 507675  |
| Lampung          | 1595109 | 1628769 | 1638090 | 1602730 | 1560051 |
| Kep.Babel        | 361088  | 365500  | 348108  | 364898  | 377812  |
| Kep.Riau         | 683895  | 727045  | 759618  | 784065  | 713861  |
| Rata-rata        | 1320002 | 1364974 | 1401641 | 1408793 | 1460716 |

Sumber: Statistik Provinsi dalam angka di Sumatera Tahun 2011-2015 (data diolah)



Tabel 6. menunjukkan jumlah dari tenaga kerja berijazah SMA/Sederajat pada Pemerintahan Provinsi di Pulau Sumatera secara nominal. Provinsi yang memiliki tenaga kerja berijazah SMA/Sederajat tertinggi adalah Provinsi Sumatera Utara dengan rentang jumlah sebesar 3.414.544 hingga 4.042.331 Jiwa dalam kurun waktu 2011 hingga 2015. Berbeda dengan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan Provinsi dengan jumlah tenaga kerja berijazah SMA/Sederajat tertinggi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Provinsi dengan jumlah tenaga kerja berijazah SMA/Sederajat terkecil dengan rentang jumlah sebesar 361.088–377.812 jiwa. Kemudian secara rata-rata, jumlah tenaga kerja berijazah SMA/Sederajat Provinsi di Pulau Sumatera berkisar antara 1.320.002–1.460.716 Jiwa.

Lewis dalam Mulyadi (2003) mengemukakan teorinya mengenai ketenagakerjaan, yaitu; kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja disektor lain.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi neo klasik, terdapatnya peran teknologi dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ditandai oleh tenaga kerja yang memiliki produktivitas kerja yang tinggi yang boleh jadi penyerapan teknologi ini terjadi karena proses pendidikan dan pelatihan. Dengan semakin banyaknya tenaga kerja yang terdidik, maka akan menciptakan kualitas dari tenaga kerja itu sendiri.

Tenaga kerja yang memiliki Ijazah SMA/Sederajat merupakan representasi dari ketersediaan tenaga kerja ahli yang memiliki penyerapan teknologi. Dalam upaya mendukung program wajib belajar 12 tahun yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal, pemerintah daerah di Pulau Sumatera lebih khusus seyogyanya dapat melakukan beberapa strategi yakni; memperbaiki fasilitas pendidikan, memberikan program beasiswa, menerapkan dan melakukan sosialisasi mengenai program pendidikan gratis, dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.

## **Kesimpulan Dan Saran**

### **Kesimpulan**

1. Desentralisasi Fiskal sisi Pengeluaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2011-2015.
2. Desentralisasi Fiskal sisi Pendapatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2011-2015.
3. Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2011-2015.
4. Desentralisasi Fiskal (Rasio Pengeluaran dan Rasio Kemandirian), dan Tenaga Kerja yang diproyeksikan dengan Rasio Tenaga Kerja Berijazah SMA/Sederajat (RTK) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2011-2015.

### **Saran**

1. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera harus lebih mempertajam alokasi belanja untuk mendukung pembangunan infrastruktur, melakukan penghematan anggaran yang kurang produktif, penerapan *reward* dan *punishment* dalam pengalokasian anggaran.
2. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah guna mencapai kemandirian daerah yang lebih baik, pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera harus meningkatkan pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan menambah objek pajak, subjek pajak, menaikan tarif pajak tertentu seperti pajak kendaraan bermotor dengan memberlakukan peraturan daerah sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya.
3. Dalam hal ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera perlu menerapkan strategi dalam meningkatkan tenaga kerja yang memiliki ijazah SMA/Sederajat. Strategi tersebut seperti memperbaiki fasilitas pendidikan, memberikan program beasiswa, menerapkan dan melakukan sosialisasi mengenai

program pendidikan gratis, dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.

Provinsi Lampung,  
Lampung.

Badan Pusat Statistik. 2011-2015. *Kompilasi Provinsi Dalam Ankgka*. BPS Provinsi Lampung, Lampung.

Badrudin, Rudi. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

## Daftar Pustaka

Abimanyu, Anggito dan Andie Megantara. 2009. *Era Baru Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Baltagi, Badi H. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data*. John Wiley and Sons Ltd, England.

Akai, Nobou, dan Masayo Sakata. 2002. Fiscal Decentralization Contributes To Economic Growth: Evidence From State-Level Cross-Section Data For The United States. *Journal Of Urban Economics* 52 (2002) 93-108.

Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*. Erlanga, Jakarta.

Akai, Nobou, Yukihiro Nishimura dan Masayo Sakata. 2007. Complementarity, Fiscal Decentralization, and Economic Growth. *Journal Economic of Governance*. 8: 339-362.

Basri, Faisal dan Haris Munandar. 2009. *Lanskap Ekonomi Indonesia : Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan edisi kelima*. STIM YKPN, Yogyakarta.

Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE, Yogyakarta.

Badan Analisa Fiskal. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Fiskal*. Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.

BPEKKI DEPKEU. 2006. *Evaluasi Mekanisme Pencairan Dana Perimbangan*. DEPKEU RI, Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2011-2015. *Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah*. BPS

Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Gramedia Pustaka, Jakarta.

Davoodi, Hamid dan Heng-fu Zou. 1998. Fiscal decentralization and

- Economic growth : A cross-country study. *Journal of Urban Economic*, 43: 244-257.
- Direktorat Jenderal Kementrian Keuangan. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Dumairy. 2001. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga, Jakarta.
- Faridi, Muhammad Zahir. 2011. Contribution of Fiscal
- Decentralization to Economic Growth : Evidence from Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS) Volume 31, Nomor 1: 1-13*.
- Gorgi, Ebrahim dan Masomeh Alipourian. 2008. Trade Openness and Economic Growth In Iran, and some OPEC Nation. *Iranian Economic Review Volume 13, Nomor 22*.
- Gujarati, Damodar N dan Dawn C.Porter. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 2*. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Hammond, George.W dan Mehmet S. Tosun. The Impact of Local Decentralization on
- Economic Growth: Evidence from U.S. Counties. *Discussion Papaer Series. IZA DP Nomor 4574*.
- Kementrian Dalam Negeri. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2013. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal*.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2008. *Desentralisasi Fiskal Politik Dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan Edisi 5*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. *Journal of Economic Development and Cultural Change*.
- Lincoln, Arsyad. 2010. *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Malarangeng, Andi Alfian. 2001. *Otonomi Daerah : Perspektif Teoritis dan Praktis*. Bigraf Publishing, Yogyakarta.

- Mangkoesoebroto, Guritno. 1998. *Ekonomi Publik Edisi 3*. BPFE, Yogyakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 1960. *TAP MPR Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969*.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 1998. *TAP MPR Nomor 25/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan RI*.
- Mankiw, N.Gregory. 2003. *Teori Makroekonomi edisi kelima*. Erlangga, Jakarta.
- Mishkin, Frederic S. 2009. *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Noor, Henry Faizal. 2013. *Ekonomi Publik : Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat*. Akademia Permata, Padang.
- Oates,Wallace E. 1993. Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal*, Volume 2 Nomor 46 Hal: 237.
- Patonov, Nikolay. 2013. Decentralization on Public Spending and Economic Growth : An Emperical Study on The Eropean Union. *Journal of International Relations Volume X1: 5-15*.
- Pemerintah Provinsi Aceh. 2012. *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Aceh*.
- Pemerintah Provinsi Aceh. 2014. *Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Umum*.
- Pemerintah Provinsi Aceh. 2014. *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Usaha*.
- Pemerintah Provinsi Aceh. 2014. *Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Tertentu*.
- Pemerintah Provinsi Bengkulu. 2011. *Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu*.
- Pemerintah Provinsi Bengkulu. 2014. *Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu*.
- Pemerintah Provinsi Bengkulu. 2015. *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum*.

- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 2011. *Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*.
- Pemerintah Provinsi Riau. 2011. *Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*.
- Pemerintah Provinsi Riau. 2013. *Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pajak Rokok*.
- Pemerintah Provinsi Riau. 2015. *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 2011. *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*.
- Prud'homme, R. 1994. On the Dangers of Decentralization. *Policy Research Working Paper 1252*. World Bank, Washington D.C.
- Rahayu, Ani Sri. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah*.
- Republik Indonesia. 1948. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri*.
- Republik Indonesia. 1950. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Timur*.
- Republik Indonesia. 1956. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. 1957. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Otonomi Daerah*.
- Republik Indonesia. 1959. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat Dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri, Dan Penyerahan Keuangannya Kepada Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. 1965. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*.

- Republik Indonesia. 1968. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah.*
- Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.*
- Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.*
- Republik Indonesia. 1995. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan.*
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.*
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.*
- S, Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia.* Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saragih, Panglima Juli. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi.* Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sasana, Hadi. 2011. Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Volume 18 Nomor 1, Maret 2011.*
- Soepangat, Edi dan Haposan Lumban Gaol. 1991. *Pengantar Ilmu Keuangan Negara.* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sukirno, Sadono.2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses Masalah dan dasar kebijakan, cetakan Ketiga.* Kencana, Jakarta.
- Sukirno, Sadono.2009. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*

Taufiqur Rahman , I Wayan Suparta , Arivina Ratih Taher

*Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Pulau Sumatera*

*Edisi Ketiga*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Decentralization and LDC Economic Growth: An Emperical Investigation. *Journal of Development Studies* : 139.

Suliswanto, Muhammad Sri Wahyudi. 2016. Tingkat Keterbukaan Ekonomi di Negara ASEAN-5. *Neo-Bis, Volume 10 Nomor 22*.

Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara, Jakarta.

Yamoah, Afia Boadiwa. 2007. The Effect Of Fiscal Decentralization On Economic Growth In U.S. Counties. *Dessertation, The Ohio State University*.

Thiessen, Ulrich. (2003). Fiscal Decentralization and Economic Growth in High Income OECD Countries. *Fiscal Studies Vol. 24 No.3*.

Zhang, Tao dan Heng-Fu Zou. 1998. *Fiscal Decentralization, Public Spending and Economic Growth in China*. *Journal Of Public Expenditure*, 67: 221-240.

Todaro, Michael P dan Smith Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi, Edisi 9*. Erlangga, Jakarta.

Ugochukwu, Ugwuegbe S dan Uruakpa Peter Chinyere. 2013. The Impact of Capital Formation on The Growth of Nigerian Economy.

*Journal of Finance and Accounting. Volume 4 Numberr 9*.

Universitas Lampung. 2014. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Unila, Bandar Lampung.

Wibowo, Puji. (2008). Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Keuangan Publik*.

Widarjono, Agus. 2007. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Ekonisia, Yogyakarta.

Woller. Gary M dan Kerk Phillips. 1998. *Fiscal*



Taufiqur Rahman , I Wayan Suparta , Arivina Ratih Taher

*Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan  
Ekonomi Provinsi Di Pulau Sumatera*